

**PENGELOLAAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI DESA
BADRAN KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pendidikan



Oleh:

Anjar Triyono

Nim : Q. 100.080.065

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Membentuk manusia seutuhnya merupakan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia seperti yang tersirat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (Renggani, 2007: 1). Dalam mengemban cita-cita tersebut tugas bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, membina dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kesadaran terhadap lingkungan serta kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Cita-cita tersebut termaktup dalam tujuan pendidikan nasioanal, yaitu Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Dunia pendidikan Indonesia tidak pernah lepas dari sejumlah persoalan. Persoalan-persoalan tersebut ada kalanya bersifat monodimensional dan ada kalanya bersifat multidimensional bahkan tak jarang setelah satu masalah terpecahkan akan muncul masalah baru (Azis, 2009: 1). Begitu rentannya dunia pendidikan kita terhadap berbagai persoalan, tidaklah berlebihan manakala pada saat ini para ahli dan praktisi pendidikan terus berupaya mengembangkan sistem pendidikan nasional yang adaptable terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, baik melalui kajian filosofis atau teoretis maupun melakukan penelitian.

Ketika pendidikan formal (PF) menjadi barang mahal yang sulit terjangkau masyarakat, angka anak putus sekolah (*drop out*) pun tak terhindarkan. Berbagai faktor penyebab yang berdiri di belakangnya (Muslich, 2009: 2). Salah satu faktor yang dominan adalah masalah ketidakmampuan masyarakat dalam membayar dan menanggung biaya pendidikan. Berdasarkan penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2005, 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak.

Sesungguhnya, pihak pemerintah melalui Depdiknas telah berusaha mengembangkan Sisdiknas dengan mengacu pada empat kebijakan strategis, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, dan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pendidikan. Namun, dalam kenyataannya masih ada sejumlah persoalan yang perlu dipecahkan dengan segera, misalnya angka putus sekolah dan buta aksara yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 melaporkan angka tertinggi tingkat buta aksara ada di pulau Jawa dengan urutan yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Anak usia di atas 15 tahun setidaknya ada 14,58 juta orang buta aksara (Azis, 2009: 3).

Penyebab tingginya angka buta aksara di Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan telah banyak merenggut hak manusia. Selain itu, kemiskinan membuat orang tua enggan menyekolahkan anaknya karena biaya pendidikan yang mahal. Angka kemiskinan di Indonesia tahun 2005 tercatat sebanyak 35,1 juta jiwa sedangkan penduduk hampir miskin 26,2 juta jiwa.

Sementara itu, pada tahun 2007, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 384.000 orang.

Data terakhir pada tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tinggal 9.763.256 atau 5,97% dengan disparitas 3,24 %. Angka ini menunjukkan keberhasilan dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tingkat keaksaraan sebanyak 95% pada akhir tahun 2009 (Depdiknas, 2009: 10).

Pemerintah Indonesia harus mempercepat pengentasan buta aksara hingga 5% dari total penduduk pada tahun 2015. Menurut Arif Rahman (2008) ada lima strategi untuk menurunkan buta aksara di Indonesia yaitu: pertama, pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat; kedua, perluasan informasi dan sosialisasi pentingnya melek aksara; ketiga, pemberdayaan sekolah formal dan non formal bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat; keempat, program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan di luar sekolah; kelima, menjalin kemitraan dengan UNESCO.

Program ini dilakukan secara bersamaan, sehingga tujuan mengentaskan kemiskinan tidak hanya sebagai wacana. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan pembelajaran keaksaraan fungsional yang merupakan bagian dari pendidikan kesetaraan sebagai salah satu upaya pendukung rencana strategi penurunan angka buta aksara (Azis, 2009: 5). Menurut UU No. 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu: pendidikan formal, nonformal, dan informal. Melalui jalur pendidikan nonformal, pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Luar Sekolah

(PLS), yang kini berubah nama menjadi Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) menyelenggarakan berbagai program yang salah satu diantaranya adalah Pendidikan Kesetaraan, yang terdiri atas (1) Program Paket A setara SD, (2) Program Paket B setara SMP, dan (3) Program Paket C setara SMA.

Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal bagi warga Negara Indonesia usia sekolah yang berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Arifin, 2007: 2).

Penyelenggaraan program keaksaraan di daerah-daerah, diawali dengan tahap belajar yang disebut sebagai keaksaraan fungsional (Andini, 2007: 4). Dalam keaksaraan fungsional, para tutor keaksaraan dibekali oleh beberapa pengetahuan keterampilan dasar dan tambahan pengetahuan tentang kerajinan-kerajinan tradisional daerah setempat. Gunanya, warga belajar tak hanya belajar mengenal huruf, tetapi juga mendapatkan pengetahuan keterampilan dari tutor keaksaraannya. Strategi ini juga berguna untuk menghindari kejenuhan belajar. Maklum, kebanyakan pesertanya adalah penduduk yang berusia di atas 30 tahun. Dalam Keaksaraan Fungsional, terdapat tiga tahap belajar, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap mahir. Jika warga belajarnya telah mampu melewati tahap mahir, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Paket A.

Sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nonformal, pendidikan keaksaraan merupakan usaha yang sistematis dan sadar untuk mengembangkan

kualitas sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dewasa, profesional dan berakhlak mulia. Program keaksaraan bertujuan untuk menciptakan manusia yang kritis, apresiatif, dan dinamis dalam mengelola kehidupannya. Unsur kritis ini akan memberikan pengaruh yang kuat dalam dimensi sosial untuk menumbuhkan masyarakat yang mandiri dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya.

Program pendidikan kesetaraan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA), selain waktu dan tempatnya yang fleksibel, program pendidikan kesetaraan memiliki sasaran yang berbeda dengan pendidikan formal. Secara umum, sasaran dari program-program pendidikan nonformal adalah mereka yang tergolong kurang beruntung, baik dari aspek ekonomis, geografis, dan sosial budaya. Dalam tatanan idealnya, pendidikan kesetaraan disamping harus memberikan kemampuan pengetahuan secara akademis sesuai dengan jenjangnya, secara terintegrasi harus juga memberikan berbagai kecakapan hidup, yang dapat dimanfaatkan para lulusannya sebagai bekal mencari nafkah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Realitanya, tatanan ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Para penyelenggara program pendidikan kesetaraan baik PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) masih banyak yang belum mampu melaksanakannya secara terintegrasi. Secara akademis, proses pembelajarannya masih terfokus kepada bagaimana warga belajar dapat lulus dalam UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan). Ironisnya, proses

pembelajaran ini pun terkadang tak berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya terbatasnya ketersediaan modul, terbatasnya tenaga tutor yang kapabel, dan keterbatasan waktu belajar (Sudaryat, 2009: 3).

Garapan pendidikan keaksaraan sangat besar, dan belum termasuk usia diatas 7–12 tahun yang tidak pernah sekolah ataupun DO kelas 1,2, dan 3 Sekolah Dasar. Begitu luas dan besarnya sasaran maka tidak berlebihan apabila pemerintah menganggap penting masalah tersebut sehingga memasukkan dalam bidang garapan pendidikan nonformal seperti termuat dalam undang-undang. Program pemberantasan buta huruf yang dikemas dalam keaksaraan fungsional merupakan pekerjaan nasional bangsa Indonesia. Program ini sesungguhnya sudah dimulai sejak sebelum masa kemerdekaan atau masa kolonial sampai saat ini. Namun demikian program yang sudah dilaksanakan itu belum tuntas juga. Banyak faktor yang menjadi penyebab belum tuntasnya pemberantasan buta aksara.

Pada sisi lain upaya pengembangan program keaksaraan dewasa ini terus digalakkan karena merupakan keharusan dan kewajiban. Dikatakan sebagai keharusan karena program keaksaraan perlu terus dikembangkan untuk lebih berperan dalam memenuhi minat dan kebutuhan belajar masyarakat. Disebut kewajiban karena kehadiran program saat ini untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang. Maka untuk mencari bentuk yang cocok diperlukan perubahan dan inovasi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai budaya dan perkembangan zaman.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan awal peneliti di lapangan, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh program ini. Hambatan-

hambatan yang ada tidak hanya bersifat teknis tapi juga non teknis. Sebagai gambaran dari pelaksanaan program dapat dipaparkan beberapa permasalahan yang klasik dan terus menerus terjadi. Pertama, permasalahan yang paling mendasar terjadi di hampir tiap kelompok dan setiap wilayah kabupaten adalah tidak ada kesesuaian antara pelaksanaan kalender pendidikan dengan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan kalender yang diterbitkan seharusnya program keaksaraan dilaksanakan selama 6 bulan mulai Juli sampai Desember pada setiap tahun. Namun kenyataannya kelompok-kelompok belajar mulai pembelajaran paling cepat bulan Agustus bahkan tidak sedikit yang memulai kegiatan pada bulan Oktober.

Untuk setiap pelaksanaan evaluasi yang dilakukan bulan Desember atau Januari tahun berikutnya, maka target materi yang harus dikuasai warga belajar sangat kurang. Sedangkan setelah Desember sampai Juni tahun berikutnya praktis tidak ada pembelajaran karena mereka merasa telah dievaluasi serta belum dimulai tahapan berikutnya. Hal tersebut terulang sepanjang pelaksanaan program yang meliputi 3 (tiga) tahapan selama 3 (tiga) tahun.

Kedua, kurangnya sarana belajar merupakan hal yang terjadi pada hampir setiap kelompok belajar, yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pengadaan maupun kemampuan tutor untuk membuat atau memanfaatkan sarana yang ada sangat lemah.

Ketiga, tutor yang ada pada program keaksaraan mempunyai kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Kemampuan yang terbatas disebabkan oleh latar belakang pekerjaan sebagian besar tutor adalah guru

sehingga proses pembelajaran cenderung klasikal seperti pendidikan formal. Disamping itu sebagian tutor lainnya mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan di luar guru.

Keempat, motivasi warga belajar untuk maju dan berkembang juga sangat rendah, yang disebabkan motif utama warga belajar untuk mengikuti program bukan berdasarkan atas kesadaran sendiri tetapi karena adanya paksaan atau ajakan orang lain. Keadaan yang demikian itu dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat sekitar kelompok terhadap pendidikan rendah. Sehingga apapun program yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka akan sulit untuk dilaksanakan.

Kelima, dukungan aparat pemerintah di luar pendidikan terhadap program sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya keterlibatan aparat tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa dan RT/RW. Keterlibatan mereka selama ini hanya sebatas pemberian ijin dan dukungan secara moril saja. Sedangkan dukungan secara fisik untuk memotivasi warga belajar tidak ada. Keenam, aparat pendidikan luar sekolah di tingkat kecamatan dan kabupaten masih ada kecenderungan bersikap kaku dan terfokus pada urusan administrasi kegiatan. Sedang aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan kualitas program kurang mendapat perhatian.

Permasalahan-permasalahan umum yang timbul seperti di atas terjadi pada program keaksaraan di setiap kabupaten di Jawa Tengah tak terkecuali di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Maka permasalahan program keaksaraan di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten

Temanggung perlu diidentifikasi sehingga dapat ditemukan permasalahan yang khusus. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?. Fokus dibagi menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimana rekrutmen warga belajar dan tutor program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pengelolaan pembelajaran dalam program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran dalam program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan rekrutmen warga belajar dan tutor program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
2. Mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran dalam program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran dalam program keaksaraan fungsional

di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori strategi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan program pendidikan nonformal secara umum dan program keaksaraan khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyelenggaran program keaksaraan fungsional, penelitian ini dapat dijadikan sebagai balikan bagi aparat pendidikan nonformal yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan program keaksaraan fungsional di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk bahan evaluasi terhadap keberhasilan program.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan strategi untuk pengembangan program keaksaraan fungsional ke depan agar lebih optimal.
- c. Sebagai pertimbangan dalam menerapkan strategi pengelolaan bagi aparat pendidikan nonformal yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan program keaksaraan fungsional di luar wilayah Temanggung.

E. Daftar Istilah

1. Strategi pengelolaan adalah cara, kiat dalam melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola program.
2. Program Keaksaraan Fungsional adalah salah satu program pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang diperlukan setiap warga negara (baca–tuliskan–hitung) bagi peningkatan mutu hidup agar lebih bermakna, berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya.
3. Rekrutmen warga belajar merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya mencari calon peserta didik sesuai dengan ketentuan dalam keaksaraan fungsional untuk mengikuti kegiatan pembelajaran keaksaraan.
4. Pengelolaan pembelajaran keaksaraan fungsional merupakan serangkaian kegiatan dan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, untuk mencapai tujuan pembelajaran.
5. Evaluasi pembelajaran keaksaraan fungsional adalah upaya penilaian dan pengukuran yang terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional.